

Nama Rumpun Ilmu: Akuntansi

**USULAN
PENELITIAN KEMITRAAN**



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

**ANALISIS SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS DI
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT
DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT**

TIM PENGUSUL

Puspita Dewi Wulaningrum, S.Pd., M.Sc. (NIDN: 0520048901/Ketua)

Desi Susilawati, S.E., M.Sc., CPA. (NIDN: 0511127604/Anggota)

Angga Ardika (NIM: 20153030007)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAPAN
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Desember 2018

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 562Akuntansi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Puspita Dewi Wulaningrum, S.Pd., M.Sc.

b. NIP : 0520048901

d. Program Studi : Akuntansi Terapan

e. No HP : 081804313217

f. Email : Puspita@umy.ac.id

Anggota Peneliti

(1)

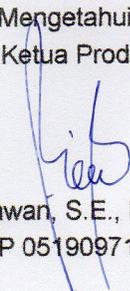
a. Nama Lengkap : Desi Susilowati, S.E., M.Sc.

b. NIDN : 0511127604

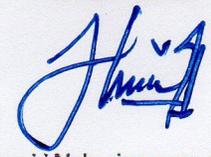
Biaya Penelitian : Rp. 15,000,000

Yogyakarta, 10-12-2018

Mengetahui,
Ketua Prodi


Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 0519097101

Ketua Peneliti


Puspita Dewi Wulaningrum, S.Pd., M.Sc.
NIP 0520048901



Menyetujui,
Dekan

Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.
NIP 0601066501

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Zakat	10
2.2. Teori Institusional	10
2.3. Teori Perkembangan Moral	12
2.4. Sistem Pengukuran Kinerja	13
2.5. Akuntabilitas	14
BAB III	15
METODE PENELITIAN	15
3.1. Populasi dan Sampel	15
3.2. Definisi Operasional	15
3.3. Teknik Pengumpulan Data	16
3.4. Metode Pengumpulan Data	16
3.5. Metode Analisis Data	16
BAB IV	17
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	17
A. Anggaran Biaya	17
B. Jadwal Penelitian	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	21

RINGKASAN

Potensi zakat di Indonesia dapat dikatakan tinggi, namun jumlah penerima zakat terbilang sedikit. Masyarakat kurang dapat mempercayakan pembayaran zakatnya pada OPZ. Hal ini menandakan kurang berhasilnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menggali potensi zakat di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengukuran kinerja di OPZ yang masih kurang optimal yang berimbas pula pada akuntabilitas OPZ. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan observasi penggunaan sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas di OPZ. Penelitian ini juga berusaha untuk menangkap dan memberikan bukti adanya fenomena isomorfisme institusional dalam lingkup implementasi sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja di OPZ. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah OPZ yang telah memiliki izin nasional yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Yogyakarta.

Kata Kunci: Zakat, Sistem Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas, Isomorfisme Institusional

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini menyebabkan prinsip Syariah dalam pelaksanaan dan tata kelola kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi tumbuh subur. Salah satu penerapan prinsip Syariah yang banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah pelaksanaan zakat. Sifat zakat yang wajib dibayarkan oleh masyarakat muslim yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu ini berimbas pada potensi peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia Organisasi Penerimaan Zakat (OPZ) dibagi menjadi dua lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang di kelola oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh pihak swasta (Indrarini & Nanda, 2017). Forum Zakat Nasional tahun 2010 mencatat terdapat 421 organisasi pengelola dana zakat di Indonesia, satu merupakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 merupakan LAZ Nasional, 32 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat provinsi, 300 merupakan BAZ tingkat Kota maupun Kabupaten dan 70 merupakan LAZ tingkat Kota maupun Kabupaten (Mubarok, 2014 dalam Indrarini & Nanda, 2017). Dari tahun ke tahun jumlah OPZ di Indonesia terus meningkat tercatat pada tahun 2012 terdapat 19 OPZ yang memiliki izin resmi pemerintah dengan pengelolaan secara Nasional. OPZ Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Organisasi Penerima Zakat Nasional

No	Organisasi Penerima Zakat (OPZ)
1	Badan Amil Zakar Nasional (BAZNAS)
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika
3	LAZ Yayasan Amanah Takaful
4	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
5	LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
6	LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
7	LAZ Yayasan Baitulmaal Hidayatullah
8	LAZ Persatuan Islam
9	LAZ Yayasan Baitulmaal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
10	LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat

11	LAZ Dewan Da'wah Indonesia
12	LAZ Baitulmaal Bank Rakyat Indonesia
13	LAZ baitul Mal Wat Tamwil
14	LAZ Baituzzakah Pertamina
15	LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
16	LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
17	LAZIZ Muhammadiyah
18	LAZIZ Nadlatul Ulama (NU)
19	LAZIZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIZ IPHI)

(Indrarini & Nanda, 2017)

Potensi penduduk yang mayoritas muslim dan keberadaan OPZ yang makin banyak menyebabkan tuntutan akuntabilitas di OPZ menjadi sangat tinggi. Akuntabilitas merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan administratif dan penyediaan layanan (Wang, 2002). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 akuntabilitas telah dijadikan sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan Negara yang dimaknai sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas di sektor publik termasuk pada OPZ ini pada akhirnya meningkatkan kebutuhan akan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pemerintahan. Peningkatan kinerja dan keberhasilan dalam reformasi administrasi membutuhkan pengembangan pengelolaan dan kerangka pengukuran kinerja (Sotirakou dan Zeppou, 2006). Konsep kinerja sendiri meliputi adanya indikator, target dan menempatkan penekanan pada output (Gajda-Lüpke, 2009). Sistem pengukuran kinerja yang merupakan hirarki tujuan dan ukuran kinerja dirasa mampu membantu menciptakan desain dan implementasi strategi serta dapat berkontribusi pada misi efektivitas, target, dan pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (Sotirakou dan Zeppou, 2006). Selain itu, salah satu keunggulan pengukuran kinerja adalah lebih menekankan pada pengelolaan hasil dan kemampuan untuk mengukur organisasi publik berdasarkan model *input-output (outcome)* (Johnsen, 2005) sehingga adanya pengukuran kinerja ini tentu akan berperan penting dalam menjawab konsep kinerja.